## PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## DAFTAR PERSYARATAN

## IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI) Perubahan Susunan Direksi dan/atau Komisaris Badan Usaha

| NO  | PERSYARATAN   |
|-----|---|
| 1.  | Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas<br>Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara  |
| 2.  | Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris sebelum dituangkan dalam akta notaris  |
| 3.  | Dasar atau alasan perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris  |
| 4.  | Dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia  |
| 5.  | Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian   |
| 6.  | Profil identitas calon Direksi dan/atau Komisaris yang disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor bagi warga negara asing dan Nomor Pokok Wajib Pajak   |
| 7.  | Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)   |
| 8.  | Surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran data dan informasi   |
| 9.  | Salinan seluruh kelengkapan dokumen administratif dan finansial dalam bentuk data digital   |
| 10. | Keterangan Status Wajib Pajak   |
| 11. | Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir  |
| 12. | Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik   |
| 13. | Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)   |
| 14. | Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir calon direksi atau komisaris yang dimohonkan kecuali bagi warga negara asing yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak |